

## PERAN KEKUASAAN DAN POLITIK KEPALA SEKOLAH DI SMP NEGERI 7 PEMALANG

Teguh Gunarso<sup>1</sup>, Turiyah<sup>2</sup>, Noor Miyono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>SMP Negeri 7 Pemalang, <sup>2</sup>SMP Negeri 1 Kajen, <sup>3</sup>Universitas PGRI Semarang

<sup>1</sup>[teguhgunarso1973@gmail.com](mailto:teguhgunarso1973@gmail.com), <sup>2</sup>[turiyahe80@gmail.com](mailto:turiyahe80@gmail.com),

<sup>3</sup>[noormiyono@upgris.ac.id](mailto:noormiyono@upgris.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to examine the role of school principals' power and politics in educational management at SMP Negeri 7 Pemalang. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore in depth the dynamics of power and politics that exist in school principal policies which influence the learning process, relationships between employees, and decision making in schools. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation involving school principals, teachers, administrative staff and other related parties. The research results show that school principals have a strong influence in determining policies, both in academic and non-academic aspects. However, the power they have often interacts with internal politics involving various groups in schools, which affects the effectiveness of implementing these policies. Internal conflicts that arise are often related to personal and group interests, which sometimes affect the quality of work and professional relationships at school. These findings provide an important picture of how politics and power within schools can influence educational performance and development at the junior high school level, as well as the importance of wise leadership strategies in facing these challenges.*

**Keywords:** *power, politics, school principal, education management*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kekuasaan dan politik kepala sekolah dalam manajemen pendidikan di SMP Negeri 7 Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika kekuasaan dan politik yang ada dalam kebijakan kepala sekolah yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, hubungan antar-pegawai, serta pengambilan keputusan di sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, staf administrasi, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki pengaruh yang kuat dalam menetapkan kebijakan, baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. Namun, kekuasaan yang dimiliki sering kali berinteraksi dengan politik internal yang melibatkan berbagai kelompok di sekolah, yang mempengaruhi efektivitas

implementasi kebijakan tersebut. Konflik internal yang muncul sering kali berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kelompok, yang terkadang mempengaruhi kualitas kerja dan hubungan profesional di sekolah. Temuan ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana politik dan kekuasaan di dalam sekolah dapat memengaruhi kinerja dan perkembangan pendidikan di tingkat SMP, serta pentingnya strategi kepemimpinan yang bijaksana dalam menghadapi tantangan tersebut.

**Kata kunci:** kekuasaan, politik, kepala sekolah, manajemen pendidikan

### **A. Pendahuluan**

Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin di sekolah yang berperan penting dalam kemajuan sekolah. Sekolah sebagai sebuah organisasi memiliki kerumitan di dalamnya. Di dalamnya terdapat pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, serta pengambil kebijakan pendidikan. Masing-masing pihak memiliki maksud dan tujuan yang beragam. Hubungan di antara mereka melibatkan dan menimbulkan konflik kepentingan diantara satu dengan yang lainnya. Dalam sekolah terdiri beragam individu yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Individu yang beragam tersebut yang nantinya dapat menimbulkan potensi konflik.

Kepala sekolah memegang peranan penting dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam sekolah,

baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia maupun hal lain. Perannya sangat penting tidak hanya terbatas tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kekuasaan dan politik kepala sekolah di sekolah tersebut. Dalam hal ini kepala sekolah yang memegang peranan penting sebagai pemimpin dalam lingkungan sekolah tersebut.

Dengan demikian, peran politik dan kekuasaan kepala sekolah menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana pengambilan keputusan untuk kemajuan sekolah. Menurut Brown dan Gilman dalam Nani Fitriyani (2016) mengungkapkan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah

hubungan nonresiprokal antara dua orang atau lebih. Nonresiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain.

Pembahasan terkait politik dan kekuasaan di sekolah dapat mencakup berbagai hal, seperti pengangkatan pengambilan keputusan, kebijakan disiplin guru dan peserta didik, maupun isu yang lain. Jika kepala sekolah dapat melaksanakan politik dan kekuasaan di sekolah dengan baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Namun, pada kenyataannya hasil pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah guru-guru mempunyai kedisiplinan yang belum maksimal diantaranya dalam masuk kelas. Hal ini didukung dengan bukti kehadiran guru pada presensi bulan Oktober tahun 2024 bahwa tingkat ketidakhadiran guru di SMP N 7 Pematang Jaya mencapai 3,26%.

Dengan latar belakang seperti itu, penulis menganggap perlu melakukan pembahasan tentang peran politik dan kekuasaan kepala sekolah di SMP N 7 Pematang Jaya. Sehingga hal tersebut bisa memberikan pemahaman kepada

pembaca terkait peran politik dan kekuasaan kepala sekolah di lingkungan sekolah. Pemahaman yang baik tentang dinamika politik dan kekuasaan di sekolah dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan nyaman bagi semua pihak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kekuasaan dan politik kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dengan melibatkan berbagai pihak di SMP N 7 Pematang Jaya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali lebih dalam tentang dinamika kekuasaan dan politik yang ada di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali makna dan pola interaksi dalam konteks kekuasaan dan politik di sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di SMP N 7 Pemasang, yaitu: Kepala Sekolah: Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh utama dalam pengambilan keputusan di sekolah. Guru: Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan dan yang berinteraksi secara langsung dengan kepala sekolah. Staf Administrasi: Pihak yang mendukung operasional sekolah dan berperan dalam pelaksanaan administrasi serta kebijakan yang ada. Pihak Terkait Lainnya: Seperti pengawas pendidikan, orang tua siswa, atau pihak lain yang memiliki pengaruh dalam kebijakan yang diterapkan di sekolah. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang komprehensif.

a. Wawancara:

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman para subjek penelitian terkait peran kekuasaan dan politik kepala sekolah. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dan terbuka kepada: Kepala sekolah, untuk memahami bagaimana

kekuasaan dan kebijakan diterapkan di sekolah, Guru, untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan dampak dari kebijakan kepala sekolah dan bagaimana politik kepala sekolah berpengaruh terhadap kehidupan mereka di sekolah, Staf administrasi, untuk menggali pandangan mereka mengenai administrasi kebijakan kepala sekolah dan implementasinya, Pihak terkait lainnya, seperti pengawas pendidikan dan orang tua siswa, untuk mendapatkan perspektif luar tentang pengaruh kepala sekolah terhadap sekolah.

b. Observasi:

Observasi dilakukan untuk memantau secara langsung interaksi antara kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya dalam berbagai kegiatan sekolah. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai implementasi kekuasaan dan politik kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Peneliti akan mengamati: Proses rapat dan pengambilan keputusan di sekolah, Interaksi sosial antara kepala sekolah dengan guru dan staf administrasi, dan Pengaruh politik kepala sekolah dalam penentuan

kebijakan sekolah yang melibatkan berbagai pihak.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi yang diterapkan oleh kepala sekolah, seperti: Dokumen rencana strategis dan program kerja kepala sekolah, notulen rapat atau hasil keputusan yang diambil rapat pimpinan sekolah, dan data administrasi sekolah mencatat kebijakan dan implementasi dari kekuasaan kepala sekolah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Panduan Wawancara: Berisi daftar pertanyaan terbuka yang akan diajukan kepada kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya, lembar Observasi: Digunakan untuk mencatat hasil observasi yang berfokus pada dinamika kekuasaan dan politik dalam interaksi sehari-hari di sekolah, Dokumentasi: Berisi pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mencakup

langkah-langkah berikut:

Pengumpulan Data: Menyusun dan mengorganisir data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Reduksi Data: Menyaring dan merangkum data yang relevan untuk menganalisis peran kekuasaan dan politik kepala sekolah, dan kategorisasi dengan mengelompokkan data dalam kategori-kategori yang berhubungan dengan peran kepala sekolah dalam kekuasaan dan politik di sekolah, Interpretasi Data: Menganalisis dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan mengenai dampak kekuasaan dan politik kepala sekolah terhadap berbagai pihak di sekolah, dan Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan temuan-temuan yang ada. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi akan membantu peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Analisis dan kajian kritis peran kekuasaan kepala sekolah di SMPN 7 Pemalang melibatkan pemahaman tentang bagaimana kepala sekolah menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam mengelola dan memimpin sekolah, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi lingkungan pendidikan di tingkat menengah pertama (SMP). Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis secara mendalam:

#### **1. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah**

Kepala sekolah adalah figur penting dalam sistem pendidikan, terutama di SMPN 7 Pemalang yang memiliki peran sebagai penghubung antara siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan visi dan misi sekolah, merencanakan kurikulum, serta memastikan kualitas pendidikan.

#### **Kekuasaan Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan:**

**Pengambilan Keputusan:** Kepala sekolah memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan strategis terkait dengan kebijakan sekolah, alokasi sumber daya, dan pengembangan

profesionalisme guru.

**Motivasi dan Pembinaan:** Kepala sekolah berperan dalam memberikan motivasi kepada guru dan siswa, serta mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekolah.

**Pengawasan:** Kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di sekolah. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan, namun terlalu banyak pengawasan juga dapat menyebabkan rasa tidak percaya di antara guru.

#### **2. Kekuasaan dalam Hubungan dengan Guru dan Staf**

Kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam hal hubungan kerja dengan guru dan staf administrasi. Ini mencakup penentuan pembagian tugas, evaluasi kinerja, serta pemberian sanksi atau penghargaan. Namun, kekuasaan ini perlu dijalankan dengan bijaksana, karena kepemimpinan yang otoriter dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.

#### **Kajian Kritis:**

**Partisipasi Guru:** Kepala sekolah yang baik harus menciptakan budaya partisipasi, di mana guru terlibat dalam pengambilan keputusan yang

memengaruhi pekerjaan mereka. Kekuasaan yang diberikan kepada kepala sekolah harus seimbang dengan pemberdayaan dan otonomi guru dalam menjalankan tugas.

**Hubungan Kekuatan:** Ketegangan antara kepala sekolah yang otoriter dan guru yang menginginkan kebebasan akademik sering terjadi. Kepala sekolah yang cenderung menggunakan kekuasaannya secara absolut dapat menyebabkan frustrasi di kalangan guru, yang akhirnya memengaruhi kinerja mereka.

### **3. Kekuasaan Kepala Sekolah dalam Manajemen Siswa**

Kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam hal pengelolaan disiplin siswa, penetapan kebijakan ekstrakurikuler, dan pengawasan proses belajar mengajar. Keputusan-keputusan ini langsung memengaruhi pengalaman pendidikan siswa di SMPN 7 Pernalang.

#### **Kajian Kritis:**

**Kebijakan Disiplin:** Terkadang, kekuasaan kepala sekolah dalam hal kebijakan disiplin bisa terlalu keras atau bahkan tidak adil, yang dapat memicu ketidakpuasan di kalangan siswa dan orang tua. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki pendekatan yang adil dan humanis

dalam menangani masalah disiplin.

**Partisipasi Siswa:** Kepala sekolah yang efektif akan memberi ruang bagi siswa untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Misalnya, dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan karakter.

### **4. Kekuasaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang ada, baik itu berupa dana, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran sekolah, memilih dan melatih staf, serta memelihara fasilitas pendidikan.

#### **Kajian Kritis:**

#### **Transparansi dan Akuntabilitas:**

Kepala sekolah yang baik harus dapat menggunakan kekuasaannya dengan cara yang transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau sumber daya sekolah.

**Pengelolaan Fasilitas:** Kepala sekolah juga harus memastikan bahwa fasilitas yang ada digunakan secara optimal dan sesuai dengan

kebutuhan pendidikan. Misalnya, pengadaan alat belajar, ruang kelas yang layak, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya.

### **5. Tantangan dalam Penggunaan Kekuasaan oleh Kepala Sekolah**

Penggunaan kekuasaan oleh kepala sekolah di SMP dapat menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

**Politik Pendidikan:** Kepala sekolah sering kali terlibat dalam dinamika politik pendidikan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pengaruh politik ini bisa memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil kepala sekolah.

**Keterbatasan Sumber Daya:** Kepala sekolah sering kali dihadapkan pada keterbatasan dana dan sumber daya lainnya, yang dapat membatasi kemampuannya untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang ideal.

**Tekanan dari Orang Tua dan Masyarakat:** Kepala sekolah juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari orang tua siswa dan masyarakat yang menginginkan pendidikan berkualitas, sementara terkadang mereka tidak menyadari keterbatasan yang ada di sekolah.

### **Analisa dan Kajian Kritis peran politik kepala sekolah di SMPN 7 Pernalang**

Kepala sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah, tidak hanya dalam aspek administratif dan pedagogis, tetapi juga dalam konteks politik. Politik dalam dunia pendidikan, khususnya yang melibatkan kepala sekolah, dapat mencakup dinamika antara kebijakan pemerintah, pengaruh kebijakan pendidikan lokal, serta interaksi antara kepala sekolah dengan guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekitar. Berikut adalah analisis dan kajian kritis mengenai peran politik kepala sekolah di SMPN 7 Pernalang.

#### **1. Pemahaman Peran Politik Kepala Sekolah**

Peran politik kepala sekolah di SMPN 7 Pernalang dapat diartikan sebagai kemampuan kepala sekolah untuk mengelola dan memanfaatkan hubungan sosial dan kekuasaan di dalam dan di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kepala sekolah harus paham tentang dinamika kekuasaan dan kebijakan yang berlaku di dunia pendidikan serta mampu menavigasi

hubungan politik yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini termasuk pengaruh kebijakan pemerintah, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta hubungan dengan stakeholder terkait seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah daerah.

## **2. Politik Kebijakan Pendidikan**

Kepala sekolah di SMPN 7 Pematang sering kali berperan sebagai eksekutor kebijakan pendidikan yang datang dari pemerintah, baik bersifat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala sekolah bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik di tingkat sekolah. Misalnya, dalam menerapkan kurikulum nasional yang ada, kepala sekolah mungkin harus menghadapi tantangan lokal, seperti kurangnya fasilitas atau perbedaan kebutuhan siswa yang beragam. Dalam konteks ini, kepala sekolah sering kali berada di posisi membutuhkan keterampilan diplomasi untuk mendekati kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, dengan tetap mempertimbangkan realitas di lapangan.

## **3. Politik Internal Sekolah**

Politik internal sekolah melibatkan interaksi kepala sekolah dengan guru, staf, dan siswa. Kepala sekolah harus mampu memimpin dengan adil dan bijaksana, memastikan agar setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Pengambilan keputusan yang melibatkan guru atau staf sering kali memerlukan pendekatan yang bijak untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan bersama sekolah. Politik internal ini mencakup bagaimana kepala sekolah menangani konflik yang muncul antara guru, siswa, dan orang tua. Konflik-konflik tersebut bisa berkisar dari perbedaan pendapat dalam hal metode pengajaran hingga masalah yang lebih personal, seperti tindakan disipliner terhadap siswa.

## **4. Politik Pendidikan Lokal dan Sosial**

Sebagai pemimpin di tingkat lokal, kepala sekolah di SMPN 7 Pematang juga perlu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Politik lokal yang terkait dengan kebijakan pendidikan dan masyarakat sekitar dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Misalnya,

kepala sekolah harus berurusan dengan pengaruh politik yang datang dari komunitas atau tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung kebijakan tertentu yang mungkin tidak selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Kepala sekolah sering kali harus menghadapi tekanan dari orang tua siswa yang ingin agar anak mereka mendapat perlakuan khusus atau prioritas tertentu, dan kepala sekolah harus mampu mengelola ekspektasi publik.

Berdasarkan analisa tentang peran kekuasaan dan politik kepala sekolah di SMP N 7 Pematang, maka dapat diberikan alternatif solusi sebagai berikut: Peran kekuasaan kepala sekolah sangat menentukan dalam kemajuan sekolah dalam hal pengambilan kebijakan sekolah. Dengan kekuasaan hendaknya dapat dijadikan sebagai jembatan dalam meningkatkan kehadiran guru di SMPN 7 Pematang.

Peran politik kepala sekolah tidak terlepas dari aktivitas yang dilaksanakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di sekolah. Dengan adanya peran politik hendaknya dapat meningkatkan kedisiplinan guru di sekolah.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas, kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Peran kekuasaan kepala sekolah sangat menentukan dalam kemajuan sekolah dalam hal pengambilan kebijakan sekolah. Peran politik kepala sekolah tidak terlepas dari aktivitas yang dilaksanakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di sekolah. Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam sekolah, hendaknya menjalankan politik dalam organisasi untuk mencapai tujuan sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Addin, Alvin Fahmi, et al.(2022). Konsep Dasar Supervisi Pendidikan. Jurnal Wahana Pendidikan Vol 9 No 2 2022. <https://jurnal.unigal.ac.id/jwp/article/view/7639>
- Fitriani, Nani. (2016). Kekuasaan, Politik, dan Konflik di dalam Organisasi: <https://dosen.perbanas.id/kekuasaan-politik-dan-konflik-di-dalam-organisasi-nani-fitriani/>
- Perdirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 tentang Model Kompetensi Kepala sekolah
- Permendikbud Ristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan

- atas Nomor Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja, Kepala sekolah, dan Pengawas sekolah
- Robbins, Stephen P. & Judge, T.A. 2008. Perilaku organisasi, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartini, Yulia. dkk. (2002). Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Edupreneurship di Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Pendidikan dan Konseling. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7395>.
- Tanjung, Rahman, et.al. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 4, Nomor 4, Agustus 2021. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2263862>.